



Hubungan pengetahuan masyarakat tentang kepesertaan JKN (BPJS) di Daerah Padang Lawas Utara

Mira Ulpayani Harahap¹, Susilawati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹miraulpayani99@gmail.com, ²susilawati@uinsu.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

7 Februari 2023

Disetujui :

17 Februari 2023

Dipublikasikan :

25 Februari 2023

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan nasional atau JKN merupakan badan lingkup dari badan penyelenggara jaminan Kesehatan sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Semua penyelenggaraan jaminan Kesehatan sudah diatur dalam undang-undang meskipun kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan masyarakat. metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan survey analitik secara observasional. Hasil penelitian yaitu menyatakan bahwa pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kepesertaan jkn, dan masyarakat telah mengikuti kepesertaan JKN. Dari responden yang ada sudah lebih dari setengah sudah menjadi peserta BPJS baik itu mandiri dan bantuan dari pemerintah.

Kata kunci: Pengetahuan masyarakat; Kepesertaan JKN

ABSTRACT

The National Health Insurance or JKN is the scope body of the social health insurance administering body (BPJS) in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. All of the implementation of health insurance has been regulated in law, although sometimes it is not in accordance with what the community expects. The purpose of this study is to determine the relationship of public knowledge. research methods. The research method used was an observational analytic survey. The results of the study stated that knowledge greatly influenced JKN membership, and the community had participated in JKN membership. From the existing respondents, more than half had become BPJS participants, both independently and with assistance from the government.

Keywords : Community knowledge; JKN – KIS Program (BPJS); National Social Security (SJSN); Health; Hospital



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Kesehatan merupakan salah satu permasalahan yang paling kompleks dalam dunia modren saat ini. Menurut Blum didalam (Makkasau, 2013) terdapat empat faktor utama yang menentukan derajat kesehatan masyarakat, yakni perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan hereditas, yang dapat diuraikan lagi kedalam faktor sekunder dan tersiernya.

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal adalah diadakannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan atau JKN merupakan program yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengobatan dirumah sakit, dan program JKN mulai dilaksanakan di tahun 2014. Selain itu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, program ini sebenarnya bukanlah program baru namun merupakan program peralihan dari program-program pemerintah sebelumnya (Maryuni et al., 2020). Kesehatan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan karena Kesehatan masyarakat yang mengalami tingkat kesakitan maka dapat mengakibatkan atau berdampak juga pada negara. Termasuk negara berkembang. Apalagi masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak akibat dari musibah yang melanda negara-negara

berkembang seperti Indonesia. Jaminan Kesehatan nasional atau JKN merupakan badan lingkup dari badan penyelenggara jaminan Kesehatan sosial (BPJS).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Republik Indonesia, 2011). Semuan penyelenggaraan jaminan Kesehatan sudah diatur dalam undang-undang meskipun kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dimana dalam undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai yang diperlukan. Namun meskipun undang-undang sudah menjelaskan hal tersebut. Tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah untuk mencapai cakupan kesehatan universal, atau cakupan keanggotaan nasional yang lengkap, pada tahun 2019 (UHC). Tidak hanya pegawai di sektor formal yang wajib mengikuti BPJS Kesehatan, tetapi juga pegawai di sektor tidak resmi untuk memenuhi tujuan tersebut (Pangestika et al., 2017).

Sehingga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka harus diiringi pula dengan partisipasi masyarakat dalam program JKN-KIS. Partisipasi yang dimaksud yaitu ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ada dalam masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri (Notoatmodjo, didalam (Niha et al., 2019)). Selain itu sejak diluncurkan hingga saat ini, JKN telah menemui banyak kendala, sebagian besar karena kurangnya sosialisasi. JKN mulai diberlakukan di Indonesia pada 1 Januari 2014. Banyak pihak yang masih awam dengan JKN hingga saat ini, sehingga belum mengetahui proses JKN yang menggunakan sistem rujukan berjenjang dan rujukan balik. Masyarakat akhirnya kebingungan mencari pengobatan akibat ketidaktahuan tersebut. Fakta bahwa masyarakat tidak mengetahui cara menjadi peserta JKN, karena BPJS tidak melakukan sosialisasi. Maka dari itu sangat penting dilakukannya untuk sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2015) menyatakan bahwa didapatkan distribusi tingkat pengetahuan pasien tentang JKN kategori baik 37,5%, cukup 28,33%, kurang 34,17%. Sehingga penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara pengetahuan tentang JKN dan kepesertaan BPJS. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Niha et al., 2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan status kepesertaan masyarakat dalam program JKN-KIS, terdapat hubungan antara pekerjaan dengan status kepesertaan masyarakat dalam program JKN-KIS, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan status kepesertaan masyarakat dalam program JKN-KIS di Kecamatan Singkil, Kota Manado. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan masyarakat. metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan survey analitik secara observasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan survey analitik secara observasional dan melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner dan mencari faktor-faktor apa yang yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat tentang kepesertaan JKN atau BPJS. Dari data yang saya peroleh dari kabupaten padang lawas utara pada tahun 2022, Sebanyak 100 orang baik dari keperataan mandiri dan juga pemerintah sampai yang tidak menggunakan BPJS. Sampel dalam penelitian ini menggunakan pendapat Gay. Menurut Gay didalam (Rafita et al., 2022) ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan kepada desain penelitian yang digunakan, dimana untuk penelitian menggunakan teknik analisis korelasional minimal 30 subjek. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta mandiri JKN dan juga kepesertaan dari pemerintah dan menambahkan beberapa masyarakat yang tidak menggunakan BPJS. Pengumpulan data baik variable bebas (pengetahuan masyarakat) atau terikat (kepesertaan JKN). Data menggunakan data sekunder dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan angket yang sudah disediakan jawabannya oleh peneliti agar masyarakat lebih mudah menjawab kuesioner. Jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 soal disertai dengan jawaban. Dan responden penelitiannya sebanyak 100 orang masyarakat yang tinggal dikabupaten padang lawas utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Frekuensi | Persentase % |
|--------------|------------|--------------|
| SMP | 18 | 18% |
| SMA | 66 | 56% |
| DIPLOMA III | 1 | 1% |
| SARJANA | 15 | 5% |
| Total | 100 | 100% |

Dari tabel diatas yang berumur 18 tahun ada 18% dan yang SMA ad 66 orang dengan persentase 66% dan DIPLOMA III sato orag (1%) dan SARJAANA ada 15 orang.

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Tentang JKN

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Masyarakat di padang Lawas utara

| Pengetahuan | Frekuensi | Persentase % |
|--------------|------------|--------------|
| Baik | 75 | 75 % |
| cukup | 17 | 17% |
| Kurang | 8 | 8% |
| Total | 100 | 100% |

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan persentasi pengetahuan sudah cukup baik dengan kategori 75 (75%) sudah melebihi dari setengah responden . dan yang cukup ada 17 (17%) dan yang kurang 8(8%). Jdi dapat disimpulkan masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang program JKN.

Distribusi Frekuensi Sikap Kepesertaan Masyarakat

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Kepesertaan

| Sikap | Frekuensi | Persentase |
|------------------------|------------|-------------|
| Mandiri | 24 | 24 % |
| Pemerintah | 64 | 64% |
| Tidak menggunakan bpjs | 12 | 12% |
| Total | 100 | 100% |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan masyarakat yang menggunakan bpjs mandiri sebanyak 24 atau 24% dan yang dri Pemerintah 64 atau 64 % dan tidak menggunakan BPJS 12 orng atau 12%.

Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat Tentang JKN

Pengetahuan masyarakat tentang JKN sudah sangat baik dimana masyarakat mencapai 75% sudah baik dalam menjawab kuesioner yang diberikan peneliti untuk dijawab oleh masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiaraningrum et al., 2014) yang menyatakan bahwa kepesertaan JKN dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dimana informasi yang diterima dapat mempengaruhi seseorang dalam pemilihan jaminan kesehatan, semakin banyak informasi yang diberikan secara jelas dan terpercaya maka akan meningkatkan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia

Sikap Kepesertaan Masyarakat

Sikap dari Kepesertaan masyarakat sudah dibantu oleh pemerintah diman pemerintah sudah memfasilitasi yang mendapat pbi (penerima bantuan iuran) sudah ada sekitar 64 % dan yang mandiri 24% dan masih ada juga masyarakat yang belum mempunyai yang namanya BPJS dan ini masih perlu ditingkatkan. Menurut Azwar didalam (Tanjung & Isnaeni, 2015) dampak yang diharapkan apabila

pengetahuan tentang JKN baik adalah ia suka atau memiliki sikap yang favorable atau sikap positif yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fithriyana, 2019) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara kepesertaan JKN secara mandiri dengan pengetahuan ($pvalue = 0,000$) dan sikap ($pvalue = 0,000$). Peneliti menyarankan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di suatu upaya peningkatan kepesertaan JKN Mandiri untuk menjamin kesehatan keluarga khususnya dan masyarakat di Puskesmas Kota Bangkinang.

Hubungan Pengetahuan dan kepesertaan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepesertaan beberapa masyarakat yang kurang pengetahuan atau kurang peduli tentang program JKN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aqsenta, 2019) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan status kepesertaan BPJS diperoleh p -value sebesar 0.000 ($p < 0.05$). Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan status kepesertaan BPJS di Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang Painan Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa diperoleh hasil responden sebanyak 100 orang . Karakteristik Responden SMP 18 (18%), SMA 66 (66%) dan DIPLOMA 1(1%) serta SARJAN 15 (15%). Dari hasil data dapat disimpulkan bahwa pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kepesertaan jkn, dan masyarakat telah mengikuti kepesertaan JKN. Dari responden yang ada sudah lebih dari setengah sudah menjadi peserta BPJS baik itu mandiri dan bantuan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqsenta, E. R. (2019). Hubungan antara pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional dan status kepesertaan BPJS pada pasien. *SKRIPSI-2019*.
- Fithriyana, R. F. (2019). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Kepala Keluarga Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dengan Kepesertaannya Secara Mandiri Di Puskesmas Bangkinang Kota. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 1–8.
- Makkasau, K. (2013). Penggunaan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam penentuan prioritas program kesehatan (studi kasus program Promosi Kesehatan). *J@ Ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 7(2), 105–112.
- Maryuni, S., Pardi, P., & Eka, A. (2020). Strategi Implementasi Program Perluasan Kepesertaan Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2).
- Niha, M. R., Korompis, G. E. C., & Mandagi, C. K. F. (2019). Hubungan Karakteristik Individu Dan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (Jkn-Kis) Dengan Status Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jkn-Kis Di Kecamatan Singkil Kota Manado. *KESMAS*, 7(5).
- Nurhayati, E. (2015). Hubungan tingkat pengetahuan pasien tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan BPJS. *Prosiding Pendidikan Dokter*, 578–583.
- Pangestika, V. F., Jati, S. P., & Sriatmi, A. (2017). Faktor–faktor yang berhubungan dengan kepesertaan sektor informal dalam BPJS kesehatan mandiri di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(3), 39–48.
- Rafita, A., Howara, D., & Khatima, H. (2022). Hubungan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Corn Chips (Studi Kasus UKM Putri Malindo 1 di Desa Salulemo Kabupaten Luwu Utara). *Agrotekbis: E-Jurnal Ilmu Pertanian*, 10(2), 267–272.

- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Tanjung, S. A., & Isnaeni, Y. (2015). *Hubungan Pengetahuan tentang JKN dengan Sikap Kepesertaan JKN Mandiri di Puskesmas Mergangsan Yogyakarta Tahun 2015*. STIKES' Aisyiyah Yogyakarta.
- Tiaraningrum, R., Setiyadi, N. A., & Werdani, K. E. (2014). *Studi Deskriptif Motivasi Dan Personal Reference Peserta Jkn Mandiri Pada Wilayah Tertinggi Di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.